

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang menjadi dasar dari pokok permasalahan yang diamati. Teori yang dibahas dalam bab ini terdiri dari pengertian pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan teori konvergensi.

2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan *Gross National Product* (GNP) per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek ekonomi saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor –faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam

pendapatan per kapita. Karena kenaikan pendapatan per kapita tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertambahan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) (Arsyad, 2010: 11).

Tujuan pembangunan ekonomi yang harus dicapai adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting di dalam kehidupan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan pendapatan per kapita yang tinggi, untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah (Sjafrizal, 1997: 27-37).

2.1.1 Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk, dan jasa

yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada) harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2010 : 374).

2.2 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Namun pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Bruto* (GDP) tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999: 147).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan pertambahan pendapatan setiap tahun (Tambunan, 2012: 40).

2.3 Hubungan antara Ketimpangan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antar tingkat ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan menggunakan hipotesis Kuznets. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada umumnya meningkat pada tingkat ketimpangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu, dan selanjutnya menurun. Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatan rendah) ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya ketimpangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan di antara tenaga kerja pada masing-masing sektor (Kuncoro, 2004: 137).

Pembangunan di dalam lingkungan daerah secara spasial tidak terlalu merata. Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami

pertumbuhan yang lambat. Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan bertujuan untuk penghapusan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja produktif, dan peningkatan *Gross National Product* (GNP) kelompok miskin. Strategi ini dapat dilakukan dengan redistribusi kekayaan harta produktif melalui kebijakan fiskal dan kredit, pemanfaatan fasilitas-fasilitas ekonomi, reorientasi produk melalui proyek padat karya dan realokasi sumber daya produktif yang menguntungkan golongan miskin melalui pengalihan investasi dari konsumsi serta penekanan sektor tradisional dan informasi di perkotaan (Suryana, 2000 : 55-59).

2.4 Konsep Konvergensi

Secara umum konvergensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini dipahami sebagai pengurangan kesenjangan pendapatan antar daerah sehingga dapat dipahami pula sebagai proses ketertinggalan daerah berpenghasilan rendah terhadap daerah penghasilan tinggi. Kesenjangan pendapatan dapat dikurangi dengan menggunakan proses konvergensi yang dihitung berdasarkan pendapatan riil per kapita.

Konvergensi merupakan konsep turunan dari model pertumbuhan pendapatan (output) Neoklasik. Secara statistik yang dimaksud dengan konvergensi adalah proses penurunan dispersi dari sekelompok data menuju satu nilai tertentu dari waktu ke waktu. Dalam teori Neoklasik, pertumbuhan pendapatan per kapita mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pendapatan per kapita awal. Dalam hal ini apabila dalam suatu negara atau daerah secara ekonomi mempunyai kesamaan utilitas dan fungsi produksi, maka negara atau daerah miskin dapat secara relatif memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan negara atau daerah

yang lebih kaya, atau dalam pengertian sederhana disebut konvergensi (Kuncoro, 2013: 278).

Konvergensi mempunyai dua hipotesis berbeda yang saling terkait. Pertama, dikemukakan oleh Barro dan Sala-i-Martin (1992) dengan menggunakan model pertumbuhan neoklasik. Salah satu aspek penting dari model ini ditelaah dan dianalisis sebagai sebuah hipotesis empiris konvergensi. Pada perekonomian tertutup tingkat pertumbuhan per kapita cenderung berhubungan terbalik dengan tingkat output atau pendapatan per kapita awal di mana daerah atau negara miskin, pertumbuhan pendapatan per kapitanya cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah atau negara kaya.

Hipotesis yang kedua adalah adanya hipotesis untuk mengejar ketertinggalan atau *catch up*. Menurut Abramovitz (1986) negara-negara dengan produktivitas rendah memiliki potensi besar untuk mencapai laju pertumbuhan tinggi. Meskipun begitu potensi pertumbuhan akan melemah bila tingkat pertumbuhan produktivitas tersebut mendekati tingkat produktivitas negara-negara yang menjadi patokannya. Hal ini mengindikasikan terjadinya proses mengejar ketertinggalan.

Konsep konvergensi menunjukkan hipotesis bahwa setiap daerah mempunyai potensi intrinsik untuk khas, apabila demikian maka dalam waktu yang cukup panjang akan ada suatu kondisi di mana masing-masing daerah akan tumbuh dengan sendirinya. Daerah yang pada awalnya kurang maju akan tumbuh lebih cepat dari pada daerah lain yang kondisi awalnya lebih baik. Pada akhirnya daerah yang kurang maju tersebut akan mampu mengejar (*catch-up*) daerah yang lebih maju sedemikian

rupa sehingga tercapai pertumbuhan dan sekaligus pemerataan antar daerah (Mankiw, 2003: 216).

Konsep konvergensi terbagi menjadi dua yaitu *beta convergen* dan *sigma convergen*. *Beta convergen* digunakan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang diperkirakan dalam menentukan tingkat konvergensi. *Beta convergen* dibagi menjadi dua yaitu konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Konvergensi absolut terjadi jika daerah yang miskin tumbuh lebih cepat dari pada daerah yang kaya sehingga hasilnya adalah tingkat PDRB per kapita daerah miskin akan sama dengan daerah yang kaya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengestimasi model di mana pendapatan awal periode sebagai satu satunya variabel penjelas bagi pertumbuhan pendapatan. Pada daerah yang miskin akan memiliki PDRB per kapita yang tinggi.

Apabila seluruh perekonomian secara hakekat adalah sama, seandainya tidak ada besar kecilnya atau kuat tidaknya kapital, maka konvergensi bisa diaplikasikan dalam pengertian konvergensi absolut, daerah miskin pertumbuhan ekonominya memiliki kecenderungan tumbuh cepat dibandingkan daerah yang kaya. Persamaan dalam konvergensi absolut adalah sebagai berikut (Acemoglu, 2008: 15):

$$g_{i,t,t-1} = \alpha \log y_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \dots\dots\dots(1)$$

Konvergensi beta yang kedua adalah konvergensi kondisional, mengindikasikan bahwa di dalam spesifikasi model mengikutsertakan jumlah variabel selain pendapatan awal periode yang diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan.

Konsep ini menyatakan bahwa konvergensi bergantung pada struktur atau karakteristik masing-masing daerah dan perbedaan struktural ini mengakibatkan perbedaan pada stabilnya pendapatan per kapita masing-masing daerah tersebut. Dengan menguji konvergensi kondisional dapat diketahui apakah daerah miskin dapat tumbuh lebih cepat dari pada daerah kaya jika variabel-variabel lainnya dianggap konstan.

Konvergensi kondisional dianggap lebih memadai untuk digunakan jika yang diinginkan, yaitu untuk mengetahui dampak dari kebijakan-kebijakan tertentu. Persamaan dalam konvergensi kondisional sebagai berikut (Acemoglu, 2008: 15):

$$g_{i,t,t-1} = \alpha \log y_{i,t-1} + X_{t-1}^T \beta + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (2)$$

Variabel X dimasukkan karena merupakan penentu potensi pendapatan atau pertumbuhan *steady-state*. Secara khusus sejak $g_{i,t,t-1} \approx \log y_{i,t} - \log y_{i,t-1}$, persamaannya dapat ditulis lebih sederhana sebagai berikut:

$$\log y_{i,t} \approx (1 + \alpha) \log y_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa $g_{i,t,t-1}$ adalah tingkat pertumbuhan tahunan antara $t - 1$ dan t di negara i , $\log y_{i,t-1}$ menunjukkan output per pekerja (atau pendapatan per kapita) pada $t - 1$, α menunjukkan *constant term* antara unit ekonomi, dan $\varepsilon_{i,t}$ adalah *error term*.

Konvergensi sigma mengukur tingkat dispersi dari pendapatan. Jika dispersi pendapatan mengalami penurunan, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan antar daerah cenderung mengecil atau telah terjadi konvergensi pendapatan. Untuk menentukan apakah konvergensi sigma terjadi maka dapat dihitung dengan

penyebaran PDRB per kapita yang diukur sebagai koefisien variasi atau standar deviasi. Konvergensi sigma terjadi apabila nilai koefisien variasi pada tahun tertentu lebih kecil dari nilai koefisien tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan telah terjadi konvergensi sigma.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990, *United Nations for Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Nilai IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli. Nilai IPM suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah atau daerah tersebut terkait mengenai aspek pembangunan manusianya, bukan hanya pada tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia (Arsyad, 2010: 46).

Konsep IPM memberikan pelajaran tentang apa yang seharusnya dipandang sebagai ukuran keberhasilan. Pembangunan berawal dan bertitik tolak dari manusia. Di dalam konsep IPM ini terdapat perpaduan antara aspek-aspek sosial dan ekonomi.

Hal tersebut memungkinkan konsep ini untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi kinerja pembangunan suatu negara (Arsyad, 2010: 49).

Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut (Badan Pusat Statistik):

$$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

di mana :

- $X_{(1)}$ = Indeks Harapan Hidup
- $X_{(2)}$ = Indeks Pendidikan
- $X_{(3)}$ = Indeks Standar Hidup Layak

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen dari IPM harus terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk), dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam menganalisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut (Badan Pusat Statistik) :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(\min)}}{X_{(\max)} - X_{(\min)}}$$

di mana :

- $X_{(i)}$ = Komponen IPM ke i
- $X_{(\max)}$ = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i
- $X_{(\min)}$ = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK diukur sebagai presentase jumlah angkatan kerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPAK} = \frac{\text{jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia kerja (15+)}} \times 100\%$$

Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*labour supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja (Kuncoro, 2013: 66).

2.7 Studi Terkait / Penelitian Terdahulu

Analisis konvergensi telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Sodik (2006) melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi regional dengan studi kasus analisis konvergensi antar provinsi di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah terjadi konvergensi di Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian adalah analisis konvergensi dengan metode data panel. Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah pertumbuhan PDRB per kapita dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa variabel penjelas lainnya. Satu elemen penting dari penelitian ini adalah tingkat konvergensi, efek positif pada pertumbuhan

ketika tingkat awal PDRB per kapita relatif tinggi terhadap variabel yang lain. Provinsi yang memiliki kepadatan tinggi secara jelas berkorelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan provinsi yang memiliki ekspor netto yang tinggi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil regresi menunjukkan pentingnya stabilitas makroekonomi regional yang direfleksikan oleh tingkat inflasi untuk pertumbuhan yang tinggi. Pada penelitian terjadi konvergensi sigma dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan PDRB riil per kapita tidak stabil antar provinsi di Indonesia atau telah terjadi ketidakmerataan dalam pertumbuhan PDRB riil per kapita antar provinsi di Indonesia.

Tajerin (2007) melakukan penelitian mengenai peranan teknologi dalam konvergensi pertumbuhan ekonomi antar daerah pesisir di kawasan timur Indonesia pada tahun 1975-2002. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memusatkan analisis pada permasalahan disparitas pendapatan antar daerah dengan melihat perbedaan dalam tingkat pertumbuhan daerah-daerah pesisir dari provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Model yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Pendekatan Model Pengejaran Teknologi *Total Factor Productivity* (TFP *catch-up*) dan Analisis Model Transfer Teknologi. Dari hasil Analisis Pendekatan Model Pengejaran Teknologi menunjukkan bahwa konvergensi antar daerah pesisir di KTI bukan disebabkan oleh tingkat investasi yang lebih tinggi atau tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih cepat, tetapi diduga karena peranan faktor akumulasi lainnya seperti teknologi. Pada Model Transfer Teknologi menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pengejaran TFP dan pendekatan transfer teknologi. Dari hasil hipotesis Model Transfer Teknologi mengindikasikan bahwa konvergensi

pertumbuhan ekonomi daerah antar daerah di KTI banyak dipengaruhi oleh perbedaan teknologi dan institusi. Hasil analisis konvergensi teknologi dalam penelitian ini adalah bahwa pengejaran TFP merupakan fenomena yang paling penting dan stabil dalam pola pertumbuhan daerah berbasis kelautan dan perikanan di Indonesia. Peranan pengejaran TFP jauh lebih dominan dibandingkan dengan akumulasi faktor.

Heriqbaldi (2009) melakukan penelitian mengenai konvergensi tingkat pendapatan studi kasus 3 provinsi di Pulau Jawa. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2004 – 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keberadaan *absolute convergence* dalam bentuk *b convergence*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di ketiga perekonomian yaitu (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah) tidak terdapat *b-convergence* maupun *s-convergence*. Di ketiga Provinsi tersebut, setiap mengalami peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten selalu disertai dengan peningkatan *gap* tingkat antar satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Ini artinya, hasil estimasi justru mengkonfirmasi bahwa, terjadinya perkembangan ekonomi secara divergen antar kabupaten di ketiga provinsi tersebut. Studi konvergensi selanjutnya dapat diarahkan pada pengakomodasian faktor-faktor yang secara signifikan membedakan satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga dapat diketahui lebih jauh determinan konvergensi atau divergensi antar daerah.

Ayuk dan Wayan (2013) melakukan penelitian mengenai konvergensi pendapatan per kapita dengan studi kasus antar kabupaten di Indonesia pada era otonomi daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji tentang

keberadaan konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten di Indonesia pada era Otonomi daerah (tahun 1999 sampai 2010). Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Regresi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita tahun 2010, mempunyai pengaruh positif terhadap selisih PDRB per kapita tahun 2010 dengan PDRB per kapita tahun 1999, namun hal tersebut berlawanan dengan hasil hipotesis mengenai konvergensi, sehingga yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah tidak terjadi konvergensi, melainkan terjadi divergensi. Dalam pengujian secara parsial terhadap variabel jarak juga menunjukkan hasil yang serupa dengan variabel PDRB perkapita 2010, namun tidak mendukung hipotesis mengenai konvergensi. Secara umum dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah masih belum mampu dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun era Otonomi Daerah.

Masfufah (2013) melakukan penelitian mengenai konvergensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika disparitas wilayah dan pembangunan infrastruktur, untuk menguji konvergensi wilayah dan membandingkan fenomena tingkat konvergensi antar wilayah koridor ekonomi di Indonesia dikaji dari pendekatan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) dan pendekatan pengeluaran rumah tangga, serta untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi disparitas wilayah koridor ekonomi di Indonesia. Periode pada penelitian ini adalah tahun 2006-2010. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk pendekatan PDRB tidak terjadi konvergensi pendapatan tingkat

kabupaten/ kota di Indonesia. Pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan estimasi menunjukkan terjadinya konvergensi. Konvergensi terjadi di setiap koridor ekonomi, baik dengan pendekatan PDRB maupun pengeluaran rumah tangga. Provinsi yang mengalami konvergensi tercepat adalah Jawa yaitu dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

